IQTISHADI
JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pengendalian Inflasi melalui Kebijakan Moneter di Indonesia

Ajeng Marisa Rachman [1], Berri Prima [2]
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon [1 3]
Marisaajeng163@gmail.com [1], berryprma@gmail.com [2]

Abstrak

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat serta dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Dalam sistem ekonomi konvensional, pengendalian inflasi dilakukan melalui kebijakan moneter dengan menggunakan instrumen suku bunga dan pengaturan jumlah uang beredar. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, sistem berbasis bunga dianggap mengandung unsur riba sehingga diperlukan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ekonomi Islam terhadap pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui pengumpulan data dari berbagai jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam memandang inflasi tidak hanya sebagai masalah moneter, tetapi juga berkaitan dengan aspek moral dan keadilan sosial. Pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam dilakukan melalui penerapan prinsip bagi hasil, larangan riba, distribusi kekayaan melalui zakat, serta penguatan sektor riil. Selain itu, instrumen moneter syariah seperti sukuk, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi tanpa menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, kebijakan moneter Islam memiliki potensi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan dalam mendukung pengendalian inflasi di Indonesia.
Kata Kunci: inflasi, kebijakan moneter, ekonomi Islam, moneter syariah, stabilitas ekonomi.

Abstract

Inflation is one of the economic problems that can affect economic stability and public welfare. Continuous increases in the prices of goods and services cause a decline in people's purchasing power and can cause social and economic instability. In the conventional economic system, inflation control is carried out through monetary policy using interest rate instruments and regulating the money supply. However, from an Islamic economic perspective, an interest-based system is considered to contain elements of usury, so a monetary policy that is in accordance with sharia principles is needed. This study aims to analyze the Islamic economic perspective on controlling inflation through monetary policy in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with a library research method through data collection from various journals, books, and relevant scientific articles. The results show that Islamic economics views inflation not only as a monetary problem, but also related to moral aspects and social justice. Inflation control in Islamic economics is carried out through the application of the principle of profit sharing, the prohibition of usury, wealth distribution through zakat, and strengthening the real sector. In addition, Islamic monetary instruments such as sukuk, Bank Indonesia Sharia Certificates

(SBIS), and the Sharia Interbank Money Market (PUAS) have a role in maintaining economic stability without using an interest system. Thus, Islamic monetary policy has the potential to create a fairer, more stable, and more sustainable economic system that supports inflation control in Indonesia.
Keywords: inflation, monetary policy, Islamic economics, Islamic monetary, economic stability.

To cite this article (Gaya APA Edisi 7th): Yasin, A. A. (2026). Rekonstruksi nafkah keluarga Muslim: Studi perilaku nafkah pada generasi sandwich. *Manhajuna: Jurnal Hukum Islam dan Fiqih Kontemporer*. https://doi.org/10.69943/kkl

Copyright © 2026 The Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang berdampak terhadap stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan inflasi Indonesia menunjukkan bahwa stabilitas harga masih menjadi perhatian penting dalam kebijakan ekonomi nasional (Badan Pusat Statistik [BPS], 2025). perkembangan inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh perubahan harga pangan, energi, serta kondisi ekonomi global. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya membutuhkan kebijakan moneter, tetapi juga pendekatan yang memperhatikan aspek distribusi dan keadilan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi dipahami sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan jumlah uang beredar, tetapi juga berkaitan dengan perilaku ekonomi, moral, dan mekanisme distribusi kekayaan.

Di Indonesia, kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Berbagai kebijakan seperti penetapan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta pengaturan cadangan wajib minimum diterapkan untuk menekan laju inflasi agar tetap berada pada tingkat yang stabil. Namun, dalam praktiknya, kebijakan moneter konvensional yang berbasis bunga sering kali menimbulkan perdebatan jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, karena sistem bunga dipandang mengandung unsur riba yang dilarang dalam syariat Islam (Amin et al., 2026).

Ekonomi Islam memandang bahwa stabilitas ekonomi harus diwujudkan melalui sistem yang adil, seimbang, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. Dalam konteks pengendalian inflasi, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda melalui penerapan prinsip syariah, seperti pengendalian jumlah uang beredar secara proporsional, pelarangan riba, optimalisasi zakat dan distribusi kekayaan, serta penguatan sektor riil. Pendekatan tersebut bertujuan menciptakan kestabilan harga tanpa menimbulkan ketimpangan ekonomi di masyarakat (Dini Abdianti et al., 2023).

Fenomena inflasi di Indonesia yang dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan, energi, dan tekanan ekonomi global menunjukkan pentingnya kebijakan pengendalian inflasi yang berkelanjutan. Meskipun Bank Indonesia telah menerapkan berbagai instrumen moneter, kajian mengenai alternatif pengendalian inflasi berbasis prinsip syariah masih relevan untuk dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana instrumen moneter syariah dan prinsip ekonomi Islam dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga di Indonesia.

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ekonomi Islam terhadap pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter di Indonesia, serta menjelaskan penerapan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Kajian Teori

Teori Inflasi

Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Dalam teori ekonomi modern, inflasi dapat disebabkan oleh faktor permintaan (demand pull inflation), kenaikan biaya produksi (cost push inflation), serta faktor moneter. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, inflasi juga dikaji melalui aspek moral dan perilaku ekonomi. Al-Maqrizi membedakan inflasi menjadi natural inflation yang disebabkan faktor alamiah dan human error inflation yang muncul akibat tindakan manusia seperti penimbunan, korupsi, dan kebijakan ekonomi yang tidak tepat.

Inflasi dalam perspektif ekonomi makro modern merupakan fenomena kenaikan tingkat harga secara umum dan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh interaksi permintaan agregat, biaya produksi, ekspektasi inflasi, serta kebijakan moneter. Pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter dilakukan dengan memengaruhi kondisi likuiditas dan mekanisme transmisi ke sektor riil (Mishkin, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, stabilitas moneter tidak hanya dipahami melalui aspek kuantitas uang, tetapi juga melalui keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil, keadilan distribusi, serta pencegahan aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif. Chapra (2000) menjelaskan bahwa sistem moneter Islam diarahkan untuk mencapai keseimbangan ekonomi melalui mekanisme yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia membentuk sistem moneter ganda (dual monetary system), yaitu keberadaan instrumen moneter konvensional dan syariah secara berdampingan. Instrumen seperti SBIS, SukBI, FASBIS, dan PUAS menjadi bagian dari operasi moneter syariah Bank Indonesia dalam mengelola likuiditas perbankan syariah (Winarto & Beik, 2024).

Kajian empiris menunjukkan bahwa instrumen moneter syariah memiliki hubungan dengan dinamika inflasi Indonesia. Winarto dan Beik (2024) menemukan bahwa beberapa instrumen seperti FASBIS, PUAS, dan pembiayaan bank syariah memiliki pengaruh terhadap inflasi dalam jangka pendek maupun panjang. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen syariah memiliki potensi sebagai bagian dari strategi stabilisasi ekonomi.

Penelitian lain mengenai efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui instrumen syariah dan konvensional menunjukkan bahwa instrumen syariah memiliki karakteristik transmisi yang berbeda dibandingkan instrumen konvensional, terutama dalam horizon waktu pengaruh terhadap inflasi (Aqidah et al., 2022).

Meskipun demikian, penguatan kebijakan moneter syariah masih membutuhkan pendalaman pasar keuangan syariah, peningkatan literasi masyarakat, serta pengembangan instrumen yang lebih efektif agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Secara umum, inflasi dapat disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, kenaikan biaya produksi, serta meningkatnya jumlah uang beredar yang tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi. Selain itu, faktor eksternal seperti kenaikan harga impor, krisis ekonomi global, dan gangguan distribusi juga dapat memicu inflasi. Inflasi yang berada pada tingkat rendah dan stabil masih dianggap wajar karena menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, namun inflasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan social (Amin et al., 2026).

Menurut Amin dalam jurnal Stabilitas Ekonomi Islam: Telaah Teoritis Terhadap Mekanisme Pengendalian Inflasi, inflasi merupakan fenomena ekonomi yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Selain itu, dijelaskan pula bahwa inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dan terus-menerus sehingga nilai riil uang mengalami penurunan (Amin et al., 2026).

Dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi tidak hanya dipandang sebagai permasalahan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek moral dan keadilan sosial. Inflasi yang tinggi dianggap dapat memperbesar kesenjangan sosial karena kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan lebih terdampak dibandingkan kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar guna menjaga stabilitas ekonomi negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas nilai mata uang. Di Indonesia, kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter dibedakan menjadi kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan dengan menambah jumlah uang beredar untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, sedangkan kebijakan moneter kontraktif dilakukan dengan mengurangi jumlah uang beredar guna menekan inflasi. Instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter konvensional antara lain suku bunga, operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, dan pengaturan kredit perbankan (Dini Abdianti et al., 2023).

Kebijakan moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Apabila jumlah uang beredar tidak dikendalikan dengan baik, maka dapat terjadi peningkatan inflasi yang menyebabkan harga barang dan jasa terus meningkat. Oleh sebab itu, bank sentral harus mampu menjaga keseimbangan antara jumlah uang beredar dan kebutuhan ekonomi masyarakat (Dini Abdianti et al., 2023).

Menurut Amin, kebijakan moneter merupakan tindakan pemerintah melalui bank sentral dengan cara memengaruhi penciptaan uang dan jumlah uang beredar untuk mencapai kondisi ekonomi yang diinginkan (Amin et al., 2026). Dengan memengaruhi jumlah uang beredar, pemerintah dapat memengaruhi tingkat konsumsi, investasi, serta kestabilan harga dalam perekonomian.

Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam merupakan kebijakan pengelolaan uang dan sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang menjadikan bunga sebagai instrumen utama, ekonomi Islam melarang praktik riba karena dianggap mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, sistem moneter Islam lebih menekankan pada prinsip bagi hasil, aktivitas ekonomi produktif, dan pemerataan distribusi kekayaan (Bintara & Wahyudi, 2023).

Tujuan utama kebijakan moneter Islam bukan hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, uang tidak boleh dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya aktivitas ekonomi riil. Peredaran uang harus didukung oleh kegiatan produksi, perdagangan, dan investasi yang nyata agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketimpangan ekonomi (Bintara & Wahyudi, 2023).

Instrumen kebijakan moneter syariah meliputi giro wajib minimum syariah, pasar uang antar bank syariah, sertifikat investasi mudharabah, serta sukuk atau obligasi syariah. Selain itu, sistem bagi hasil diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah sebagai pengganti sistem bunga.

Dalam jurnal Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam dijelaskan bahwa kebijakan moneter Islam lebih berfokus pada pemeliharaan perputaran sumber daya ekonomi dan pengembangan usaha produktif berbasis syariah (Sukmawati et al., n.d.). Selain itu, instrumen kebijakan moneter Islam tidak memperkenankan penggunaan bunga sebagai instrumen utama, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil sebagai dasar pengelolaan keuangan (Sukmawati et al., n.d.)

Prinsip Ekonomi Islam Terkait Stabilitas Harga

Stabilitas harga dalam ekonomi Islam merupakan bagian penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keadilan sosial. Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh prinsip keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, stabilitas harga perlu dijaga agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak tanpa mengalami tekanan ekonomi akibat kenaikan harga yang berlebihan.

Salah satu prinsip utama ekonomi Islam dalam menjaga stabilitas harga adalah larangan riba. Riba dianggap dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi karena memberikan keuntungan tanpa adanya aktivitas produktif yang nyata. Selain itu, Islam juga melarang praktik penimbunan barang (ihtikar), monopoli, dan spekulasi karena dapat menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga secara tidak wajar.

Ekonomi Islam juga mendorong distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu. Dengan distribusi kekayaan yang lebih merata, daya beli masyarakat dapat tetap terjaga sehingga kestabilan ekonomi lebih mudah tercapai.

Menurut Amin, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba dan kewajiban zakat menjadi dasar dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Amin et al., 2026). Selain itu, kebijakan moneter Islam juga menekankan bahwa kekayaan tidak boleh ditimbun dan harus diputar dalam kegiatan ekonomi produktif demi menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga resmi, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik inflasi, kebijakan moneter, dan ekonomi Islam. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kriteria: (1) memiliki relevansi dengan fokus penelitian, (2) berasal dari sumber akademik atau institusi terpercaya, dan (3) memiliki keterkaitan dengan konsep kebijakan moneter syariah. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui proses identifikasi, perbandingan, dan interpretasi konsep.

Metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, peraturan resmi, serta sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi ilmiah mengenai inflasi, kebijakan moneter konvensional, kebijakan moneter syariah, serta prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses membaca, memahami, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep pengendalian inflasi dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini juga melakukan perbandingan teoritis antara kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter Islam untuk melihat perbedaan pendekatan dalam pengendalian inflasi. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur akademik yang membahas inflasi, instrumen moneter syariah, serta prinsip ekonomi Islam.

Menurut Amin, penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengolah berbagai sumber pustaka

yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas perekonomian suatu negara. Kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya biaya hidup, serta menimbulkan ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi. Di Indonesia, inflasi sering dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti meningkatnya jumlah uang beredar, kenaikan harga bahan pokok, fluktuasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi, serta kondisi ekonomi global yang tidak stabil (Bintara & Wahyudi, 2023).

Dalam sistem ekonomi konvensional, pengendalian inflasi dilakukan melalui kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mengatur jumlah uang beredar melalui instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, dan pengendalian kredit perbankan. Ketika inflasi meningkat, bank sentral biasanya akan menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga tingkat konsumsi dan investasi dapat ditekan.

Namun, kebijakan moneter konvensional yang berbasis bunga sering mendapat kritik dalam perspektif ekonomi Islam. Sistem bunga dianggap mengandung unsur riba yang dilarang dalam syariat Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan memperbesar kesenjangan sosial. Dalam ekonomi Islam, uang tidak dipandang sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan semata, melainkan sebagai alat tukar yang harus digunakan dalam aktivitas ekonomi riil dan produktif (Bintara & Wahyudi, 2023).

Berdasarkan hasil kajian literatur, ekonomi Islam menawarkan pendekatan pengendalian inflasi yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas harga, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial. Perbedaan utama dengan sistem konvensional terletak pada penggunaan instrumen kebijakan. Sistem konvensional menggunakan suku bunga sebagai salah satu instrumen utama, sedangkan ekonomi Islam menekankan prinsip bagi hasil, penguatan sektor riil, dan distribusi kekayaan melalui instrumen sosial seperti zakat.

Dalam ekonomi Islam, pengendalian inflasi dilakukan melalui kebijakan moneter berbasis syariah yang bebas dari riba dan spekulasi. Sistem moneter Islam menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai pengganti sistem bunga. Dengan sistem tersebut, hubungan antara lembaga keuangan dan masyarakat didasarkan pada prinsip keadilan dan kerja sama sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara seimbang.

Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut memiliki peran dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Distribusi kekayaan yang merata dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kestabilan ekonomi lebih mudah tercapai.

Pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam juga dilakukan dengan melarang praktik penimbunan barang (ihtikar), monopoli, dan spekulasi yang dapat menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga secara tidak wajar. Islam mengajarkan bahwa kekayaan harus diputar dalam aktivitas produktif dan tidak boleh hanya beredar pada kelompok tertentu. Dengan demikian, stabilitas harga dapat terjaga melalui keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat.

Di Indonesia, implementasi kebijakan moneter syariah dilakukan melalui berbagai instrumen seperti Giro Wajib Minimum (GWM) syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), dan sukuk. Instrumen tersebut berperan dalam pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa dominasi sistem keuangan konvensional, keterbatasan instrumen, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam memiliki potensi dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal tersebut karena sistem ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan penguatan sektor riil, distribusi kekayaan yang merata, serta pengelolaan uang beredar yang sesuai prinsip syariah, ekonomi Islam dapat menjadi alternatif dalam pengendalian inflasi di Indonesia.

Walaupun memiliki potensi sebagai alternatif pengendalian inflasi, kebijakan moneter syariah masih memerlukan penguatan dari sisi regulasi, inovasi instrumen keuangan, peningkatan literasi ekonomi syariah, dan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah, serta masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, inflasi merupakan persoalan ekonomi yang berkaitan dengan stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam memandang bahwa pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui pengaturan aspek moneter, tetapi juga melalui pendekatan moral, pemerataan distribusi, dan penguatan sektor riil.

Ekonomi Islam memandang bahwa inflasi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh perilaku manusia seperti korupsi, penimbunan barang, dan pengelolaan keuangan yang tidak adil. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam dilakukan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, yaitu dengan menerapkan prinsip keadilan, pemerataan distribusi kekayaan, penguatan sektor riil, serta pelarangan praktik riba dan spekulasi.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia dapat terus mengembangkan instrumen moneter syariah sebagai bagian dari strategi stabilisasi ekonomi. Lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan inovasi produk dan edukasi masyarakat agar kontribusi ekonomi syariah semakin optimal. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris mengenai efektivitas instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Indonesia.

Referensi

Amin, F., Janwari, Y., & Hakim, S. A. (2026). Stabilitas ekonomi Islam: Telaah teoritis terhadap mekanisme pengendalian inflasi. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7*(1), 90–101. https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v7i1.4055

Aqidah, N. A., Ishak, I., Takdir, T., & Azzahra, M. (2022). Analisis efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui instrumen syariah dan konvensional dalam memengaruhi inflasi di Indonesia. *Owner, 6*(3), 2345–2353.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Perkembangan indeks harga konsumen/inflasi Indonesia*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Perkembangan indeks harga konsumen (IHK) dan inflasi Desember 2024*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id

Bank Indonesia. (2024). *Laporan perekonomian Indonesia 2024*. Bank Indonesia.

Bintara, Y. P., & Wahyudi, A. (2023). Mekanisme pengendalian inflasi: Pendekatan Islam dalam memelihara stabilitas harga. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8*(3). https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20698

Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics* (8th ed.). Pearson.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Dini Abdianti, A. R., & Al Ayyubi, S. (2023). Konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis: Cuan, 1*(2), 106–120. https://doi.org/10.59603/cuan.v1i2.20

Mahmud, P. P., Darmawati, & Mainata, D. (2024). Analisis efektivitas instrumen moneter syariah dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance, 3*(1), 105–125.

Mishkin, F. S. (2022). *The economics of money, banking, and financial markets* (13th ed.). Pearson.

Sukmawati, D., Komariyah, N., Fitriati, A., & Asshiddiqi, U. G. (n.d.). *Konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam*.

Winarto, F. H., & Beik, I. S. (2024). The effect of Sharia monetary policy instruments and Islamic bank financing on economic growth and inflation. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 10*(1), 72–89. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol10.iss1.art6